

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teroi yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan judul yang sama dengan penulis teliti, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memeperkaya referensi berikut merupakan penjabaran penelitian terdahulu. Penulis akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu seperti haknya dalam penelitian:

Penelitian terdahulu dapat dilakukan oleh penelitian lain diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Yulin Ratini, Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga (Skripsi 2017) yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikam Multikultural (Telaah Al-qur’an Surah Al-Hujurat Ayat 13)”. Penelitian ini berfokus kepada nilai-niali pendidikan multikultur si dalam surat Al-Hujurat, diantaranya kesetaraan, gender, perbedaan bangsa dan suku, ta’aruf, dan taqwa atau puncaknya taqwa. Implementasi atau penerapannya adalah sebagai manusia yang diciptakan dari satu pasangan yaitu Adam dan Hawa, dan setelah itu dijadikan prbedaan bangsa, suku, Bahasa, ras, adalah bukan alasan untuk saling membenci karena perbedaan itu, akan tetapi untuk saling mengenal dan saling tolong menolong, serta untuk menambah pengetahuan tentang perbedaan yang

dimiliki masing-masing manusia, supaya nantinya bisa menjadi insan yang disayang oleh Allah karena ketaqwaan terhadap-Nya.

Kedua, Zen Marchel Orlando Siboro, FISIP Universitas Sumatera Utara (Skripsi 2014) yang berjudul “Politik Multikulturalisme Di Samosir” penelitian ini berfokus kepada ekplorasi kondisi Politik Multikulturalisme dan partisipasi masyarakat beda etnis dalam Politik Multikulturalisme di Kabupaten Samosir periode 2009-2014.

Ketiga, Jamalludin Alafgani, FISIP Universitas Siliwangi (Skripsi 2017) yang berjudul “Gerakan Sosial Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Gerakan Komunitas Sabalad dalam Pendidikan di Kabupaten Pangandaran)” penelitian ini berfokus pada Gerakan Sosial yang berbasiskan komunitas yang melakukan advokasi di bidang pendidikan yaitu salah satunya terhadap sekolah SMK Baktikarya Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Tabel II. 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yulin Ratini, Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga (Skripsi 2017) yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural (Telaah Al-qur’an	Penelitian ini membahas mengenai, pengkajian isi kandungan Al-qur’an surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan mengenai hakikat manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas nilai-nilai multikultural .	Perbedaan dalam pembahasan nya lebih condong terhadap pada asas syariat agama islam yaitu telaah Al-qur’an pada surah Al-hujurat ayat 13. Pada metode penelitian yang

	Surah Al-Hujurat Ayat 13)	bersuku-suku tidak lain agar mereka saling mengenal dan saling menghargai antara manusia.		diguakan yaitu menggunakan penelitian perpustakaan (<i>Library Research</i>).
2.	Zen Marchel Orlando Siboro, FISIP Universitas Sumatera Utara (Skripsi 2014) yang berjudul “Politik Multikulturalisme Di Samosir”	Keanekaragaman di Kab. Samosir terlihat dengan adanya beragam etnis, agama, dan adanya aliran kepercayaan. Keanekaragaman yang terjadi juga terlihat dari segi ekonomi dengan beragamnya profesi yang ada. Politik multikultural, tentu memiliki keanekaragaman di dalam kegiatan politik, dimulai dengan tingkat partisipasinya masyarakat minoritas dalam kegiatan politik sampai pada peran pemerintah dalam politik multikultural di Kab. Samosir	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang multikulturalisme	Perbedaan Tersebut dalam pembahasannya lebih condong kepada suatu Kasus dan dan cakupan multikultural di kalangan masyarakat. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian perpustakaan (<i>Library Research</i>).
3.	Ketiga, Jamalludin Alafgani, FISIP Universitas Siliwangi (Skripsi 2017) yang berjudul “Gerakan Sosial Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Gerakan	Komunitas Sabalad memberikan effect yang baik terhadap perkembangan pendidikan. Pengadvokasian terhadap salah satu sekolah yang hampir bangkrut, mejadi sekolah yang bisa dinikmati oleh warga	Persamaan dalam penelian ini terdapat pada obyek penelitiannya yaitu sekolah dengan siswa yang berlatar belakang multikultur/majemuk yang bernama SMK Bakti Karya Parigi, Kab. Pangandaran	Pembahasan lebih kepada gerakan sosial dalam bentuk komunitas “Komunitas Sabalad” yang berfokus pada bidang literasi pendidikan, serta

	Komunitas Sabalad dalam Pendidikan di Kabupaten Pangandaran)”	sekitar bahkan dari luar pulau secara gratis. Juga melahirkan		melakukan advokasi dan integrasian terhadap sekolah SMK Bakti Karya, Kab. Pangandaran.
--	---	---	--	--

B. Landasan Teoritis

1. Konsep Multikulturalisme

a. Perkembangan Multikulturalisme

Paham multikultural dapat dikatakan berkembang dari negara besar demokrasi, yaitu Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena justru sebagai pentolan demokrasi, hidup dengan subur segresi dan diskriminasi ras di dalam masyarakatnya. Sejarah mencatat terjadinya perang saudara pada pertengahan abad ke-19 sebenarnya merupakan cikal bakal lahirnya multikulturalisme di dunia. Abraham Lincon sebagai pejuang demokrasi dengan politiknya abolisinya menghapus perbudakan telah menepatkan ras negro pada tempat yang layak di dalam masyarakat Amerika yang demokratis itu. Perjuangan antirasisme, antisegregasi, menjalani waktu yang sangat panjang sampai kepada perjuangan tokoh anti seegregasi Martin Luther King. Perkembangan multikulturalisme yang panjang di Amerika Serikat dapat didefinisikan ke dalam tiga fase yaitu: 1) perjuangan untuk mencapai kesamaan kedudukan dari ras-ras yang berbeda di dalam masyarakat (disokong oleh paham demokrasi); 2) sesuai dengan perkembangan akan hak

asasi manusia, gerakan rasisme semakin menyempit dan ditolak oleh masyarakat luas; 3) pengakuan terhadap pluralisme budaya.¹

b. Konsep Multikulturalisme

Akar kata Multikulturalisme adalah kebudayaan. Sementara secara etimologi, istilah multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/isme). Adapun secara hakiki, dalam kata multikulturalisme itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dan kebudayaannya masing-masing yang unik.² Sedangkan kultur (budaya) merupakan berasal dari (bahasa Sansekerta) *budhayah* yang merupakan bentuk jamak kata “budhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Sedangkan menurut seorang antropolog, yaitu E.B Tylor (1871) kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.³

Multikulturalisme sebenarnya merupakan sebuah konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman kita bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-

¹ H. A. R. Tilaar, *Op.Cit.*, 89-99.

² Choirul Mahfud, *Op.Cit.*, Hlm. 75.

³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 150.

budaya yang beragam (multikultur). Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang sekelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip-prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.⁴ Sehingga multikulturalisme tidak hanya mengakui adanya keberagaman budaya, melainkan juga menghendaki adanya penghormatan dari masing-masing budaya yang berbeda.

Menurut Sitaremi (2003), paradigma multikulturalisme pada anak dapat dilakukan melalui cara-cara berikut.⁵

- 1) Menyampaikan pesan tentang multikulturalisme dengan memberikan contoh kehidupan sehari-hari.
- 2) Secara tidak langsung, yaitu menyampaikan cerita yang berisi pesan multikulturalisme, antara lain dari dongeng, dan fable.

2. Pendidikan Multikultural

Definisi pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh James A. Banks menurutnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai “konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, tanpa memandang gender dan kelas sosial, etnik, ras, agama dan karakteristik kultural mereka untuk belajar di dalam kelas” Definisi Banks ini lebih bersifat umum, dalam arti ia tidak membatasi pendidikan multikultural hanya dalam satu aspek saja, melainkan semua aspek kultural. Ringkasnya bagi

⁴Ngainum Naim & Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 124.

⁵ Yaya Suryana dan Rudiana, *Op,Cit.*, hlm. 195.

Banks seharusnya mencakup semua aspek dalam pendidikan seperti, pendidik, materi, metode, kurikulum, dan lain-lain. Dengan demikian, apa pun latar belakang peserta didik yang berupa gender, kelas sosial, etnik, agama, dan ras, mereka akan memperoleh hak dan perlakuan yang sama dari sekolah.⁶

Pengertian Pendidikan Multikultural dalam bukunya *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Proses, and Content*, Hilda Hernandez mengartikan pendidikan multikultural sebagai persepektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-kecualian dalam proses pendidikan multikultural. Atau, dengan lain kata, bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu pengetahuan hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (plural), baik latar belakang maupun basis sosio budaya yang melingkupinya.⁷

Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Paulo Freire (pakar pendidikan pembebasan), bahwa pendidikan bukan merupakan “Menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan, menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan,

⁶ Abdullah Ally, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 107.

⁷ Choirul Mahfud, *op.cit.*, hlm. 176.

bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang di dalamnya.⁸

a. Dimensi Pendidikan Multikultural

James A. Bank (1997) menjelaskan, bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu:⁹

- 1) **Pertama**, *Content Intergration*, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
- 2) **Kedua**, *the knowledge construction process*, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin).
- 3) **Ketiga**, *an equity paedagogy*, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya, ataupun sosial.
- 4) **Keempat**, *prejudice reduction*, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh guru/tenaga pengajar dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hlm. 177.

c. Pendekatan Pendidikan Multikultural

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pertama, tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan, atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal.
- 2) Kedua, hindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik lebih mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok sosial yang *relative self sufficient*, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus-menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan.
- 3) Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru” biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, maka dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik merupakan antithesis terhadap tujuan pendidikan multikultural.
- 4) Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi, itu ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proposional.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 192.

- 5) Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan (baik formal maupun non formal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan.

d. Tujuan Pendidikan Multikultural

Mewujudkan multikulturalisme dalam dunia pendidikan, maka pendidikan berbasis multikultural juga perlu dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, yang pada akhirnya dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural, serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan guna mewujudkannya. Lebih jelasnya, uraian berikut ini:¹¹

- 1) Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik
- 2) Siswa tidak tercabut dari akar kebudayaan
- 3) Pengembangan kurikulum nasional
- 4) Menuju masyarakat Indonesia yang Multikultural.

3. Pendidikan Multikultural di Indonesia

Gagasan multikulturalisme di Indonesia kembali muncul ke permukaan pada tahun 2002. Hal ini sejalan dengan bergulirnya reformasi 1998 dan diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 1999. Pemerintahan orde baru pemerintahan cenderung dijalankan secara sentralistik dengan menggunakan politik kebudayaan yang seragam dan menggunakan tipe pendekatan “permadani” dalam melihat masyarakat yang multikultural. Pasca orde baru desentralisasi berkembang dan kedaerahan turut meningkat, hal ini

¹¹*Ibid*, hlm. 216.

disadari dapat menimbulkan efek yang kontra produktif jika dilihat dari perspektif kesatuan dan integrasi nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukannya kembali gagasan diimplementasikannya multikulturalisme di Indonesia. Pada dasarnya paham multikulturalisme yang tumbuh dan berkembang di Amerika dan Kanada. Paham multikulturalisme sejalan dengan fakta sosial yang sudah ada di Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika. Baik antara multikulturalisme dan bhineka tunggal ika memiliki semangat yang sama yakni: *unity in diversity* bukan *uniformity in diversity*. Maka dari perlunya penanaman nilai-nilai Multikulturalisme yang sejalan dengan Bhineka Tunggal Ika melalui pendidikan.

Penanaman nilai-nilai multikulturalisme juga kebhinekaan melalui jalur pendidikan. Di dunia sudah mengenal yang namanya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini penting diberikan kepada anak atau peserta didik dengan harapan anak mampu memahami bahwa di dalam lingkungan mereka dan juga lingkungan dirinya terdapat keragaman budaya. Keragaman budaya tersebut berpengaruh kepada tingkah laku, sikap, pola pikir manusia, sehingga manusia tersebut memiliki cara-cara (*usage*), kebiasaan (*folk*), bahkan adat istiadat (*customs*) yang berbeda satu dengan yang lainnya (Hanum dan Rahmadona, 2010). Pendidikan Multikulturalisme juga merupakan juga merupakan transformasi pendidikan untuk menyadarkan

masyarakat akan pentingnya pemahaman relativisme kebudayaan (*cultural relevation*) (Sunarto, Hiang dan Fedyani, 2004).¹²

4. Pendidikan Berbasis Multikultural

Dalam buku *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*, karya seorang pakar pendidikan multikultural dari *California State University*, Amerika Serikat, Hilda Hernandez, telah mengungkapkan dua definisi ‘klasik’ untuk menekankan dimensi konseptual *Multicultural Based Education* (MBE) yang penting bagi para pendidik. Definisi pertama menekankan esensi MBE sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam (*plural*) secara kultur. Definisi ini juga bermaksud merefleksikan pentingnya budaya ras, gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. MBE adalah sebuah kegiatan pendidikan yang bersifat *empowering*. MBE, menurut Hernandez, adalah sebuah visi tentang pendidikan yang selayaknya dan seharusnya bisa untuk semua anak didik. MBE menyoal tentang etnisitas, gender, kelas, bahasa, agama, dan perkecualian-perkecualian yang mempengaruhi, membentuk, dan mempola tiap-tiap individu sebagai makhluk budaya. MBE adalah hasil perkembangan seutuhnya dari kontelasi/interaksi untuk masing-masing individu yang memiliki kecerdasan, kemampuan, dan bakat. MBE mempersiapkan anak didik bagi kewarganegaraan dalam setiap komunitas

¹² Hadi Nurcahyono, “Pendidikan Multikultural di Indonesia: Analisis Sinkronis dan Diakronis”, *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi*. Vol. 2 No. 1 Maret 2018, p.105-115.

budaya dan Bahasa yang majemuk dan saling terkait. MBE yang sangat signifikan, ia menggambarkan realitas budaya, politik, sosial, ekonomi yang kompleks, yang secara luas dan sistematis memengaruhi segala sesuatu yang terjadi di dalam sekolah dan luar ruangan. MBE menyangkut seluruh asset pendidikan yang termanifestasikan melalui konteks, proses, dan muatan (*content*). MBE menegaskan dan memperluas kembali praktik yang patut dicontoh, dan berupaya memperbaiki berbagai kesempatan pendidikan optimal yang bertolak serta membincangkan seputar penciptaan lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, yang mencerminkan cita-cita persamaan, kesetaraan dan keunggulan.¹³

5. Nilai-Nilai Multikulturalisme

a. Nilai Toleransi

Toleransi merupakan kemampuan untuk dapat menghormati sifat-sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Secara metodologis, toleransi adalah penerimaan terhadap tampak sampai kepaluannya tersingkap. Toleransi relevan dengan epistemologi. Toleransi adalah keyakinan bahwa keanekaragaman agama terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya, baik kondisi ruang, waktu, prasangka, keinginan, dan kepentingannya yang berbeda antara satu agama dengan agama lainnya.¹⁴

¹³*Ibid*, hlm. 196.

¹⁴ Ngainum Naim & Achmad Sauqi, *Op.cit.*, hlm. 75.

Namun perlu digarisbawahi di sini, toleransi dalam hal keagamaan bukan dimaknai sebagai sikap menerima ajara agama-agama lain, seperti halnya kepercayaan. Melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk satu agama dalam pergaulan hidup dengan orang yang tidak seagama. Sebagai umt yang beragama, diharapkan dapat membangun sebuah tradisi wacana keagamaan yang menghargai keberadaan agama lain, dan bisa menghadirkan wacana agama yang toleran dan transformatif. Sehingga dapat dipertegas bahwa toleransi bukanlah dimaknai sebagai mengakui terhadap agama merekea dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Selain itu, toleransi juga bukan berarti sikap kompromi atau kerjasama dalam keyakinan.

b. Nilai Kesetaraan

Multikulturalisme sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesedarajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang lain penting kita pahami bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Jika tidak, dalam masyarakat kita kemungkinan besar akan selalu terjadi konflik akibat ketidak saling pengertian dan pemahaman terhadap realitas multikultural. Jika difahami, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pengakuan atau penghargaan. Sedangkan pengingkaran masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari ketimpangan di berbagai bidang kehidupan. Sebenarnya, pengertian model pembelajaran pendidikan kesetaraan adalah suatu konsep teoritis logis dan sistematis

mengenai cara warga belajar, Tutor/ Narasumber Teknis dan pengelolaan program untuk mengorganisir proses pembelajaran yang berlangsung di luar sistem persekolahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁵

Konsep ini sejalan dengan gagasan multikulturalisme yang dinilai dapat mengkoordinir kesetaraan budaya yang mampu merendam konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat yang heterogen di mana tuntutan akan pengakuan atas eksistensi dan keunikan budaya, kelompok, dan etnis sangat lumrah terjadi.

c. Nilai Demokrasi/Kebabasan

Sejarah peselisihan “demokrasi dapat ditelusuri jauh ke belakang. Konsep ini ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM). Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan ternama dari Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas terhadap semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.¹⁶ Menurut Farida Hanum, nilai demokratisasi atau

¹⁵ Ibrahim, *Bagaimana-Mengkaji Model-Pendidikan-Kesetaraan*.

<http://www.pnfi.Depdiknas.go.id/artikel/20090911191007/>. (Diakses 19 September 2018).

¹⁶ Eep Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=we&rct=j&url=http://digilib.uin-suka.ac.id/4344/&ved=2ahUKEwiVvKPYmNDdAhXMo48KYQgBq8QFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw2XLC7hzwT6MUhF6PEfmGjw> (Diakses 15 September 2018).

keadilan sebuah istilah yang menyeluruh dalam segala bentuk, baik keadilan budaya, politik maupun sosial.¹⁷

Dalam perkembangannya kemudian, pertumbuhan istilah demokrasi mengalami masa subur dan pergeseran kearah pemodernan pada masa bangun kembali dan *renaissance*. Dari berbagai studi tentang istilah demokrasi adalah bahwa ia (istilah demokrasi tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi kompleksitas kehidupan masyarakat maka semakin rumit dan tidak sederhana pula demokrasi didefinisikan.

d. Nilai Keadilan

Prinsip keadilan menjadi pilar pendidikan multikultural. Keadilan dalam proses pendidikan termasuk didalamnya siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh transformasi ilmu maupun keadilan dalam memberikan kesempatan yang sama walaupun latar belakang siswa berbeda. Hal ini diungkapkan dalam UU Sidiknas No. 20 Tahun 2003 tertera dalam BAB IV bagian keempat tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah (Pasal 11 ayat 1), yang berbunyi:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

¹⁷ Yaya Suryana dan Rusdiana, *Op.Cit.*, hlm. 200-201.

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”¹⁸

Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit ¹⁹ Jadi kelayakan merupakan suatu keharusan yang diterima atau dilakukan oleh sesama manusia.

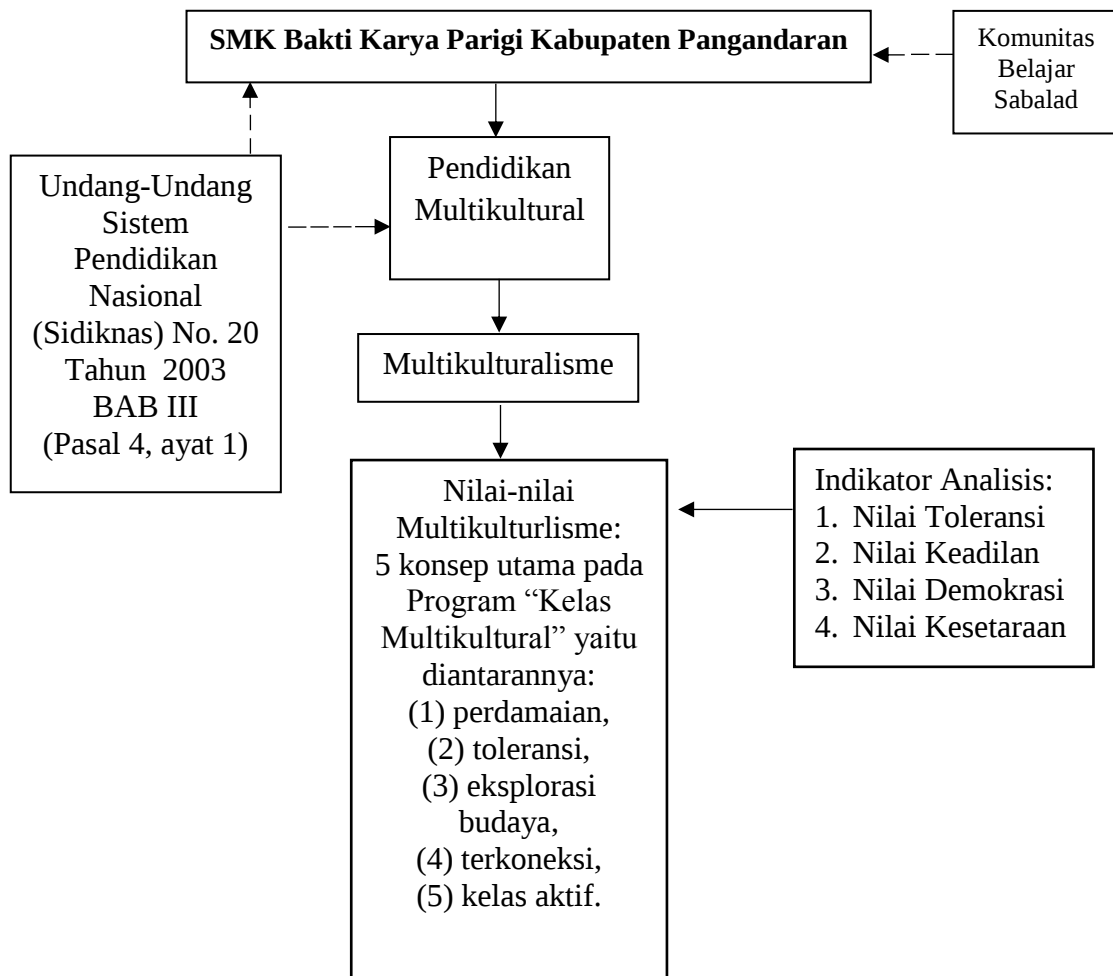
¹⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

¹⁹ Dhea Susilawati, *Belajar Sosiologi*,
<http://google.co.id/dheadedott.blogspot.com/201/11/masyarkat-multikultural-keadilan-dan.html?m=1> (Diakses 15 September 2018).

C. Kerangka Pemikiran

1. Skema Pemikiran

Tabel II. 2
Skema Pemikiran



2. Penjelasan Kerangka Pemikiran

Pendidikan berbasis multikultural merupakan salah satu unsur pembentukan karakter dan perkembangan diri manusia. Pendidikan seolah tidak henti-hentinya menjalankan peran penting untuk dijadikan manusia dari tidak mengetahui menjadi paham. SMK Bakti Karya Parigi merupakan salah satu sekolah dengan kemajemukan (multikultur) peserta didiknya serta terdapat pendidikan berbasis multikultural pada penyelenggaraan program “kelas multikultural”. SMK Bakti Karya resmi terintegrasi dengan Komunitas Sabalad disertai manajemen baru lebih terbuka dan dikelola oleh guru-guru muda serta tambahan pengajar relawan dari berbagai daerah. Komunitas Sabalad itu sendiri merupakan sebuah komunitas tempat berkawan dan mencari ilmu yang bergerak di bidang literasi pendidikan, budaya, seni dan media. Komunitas Sabalad ini di ketuai oleh Bapak Ai Nurhidayat.

Kesadaran akan pentingnya multikulturalisme bagi peserta didik perlu ditingkatkan, mengingat pendidikan berbasis multikultural merupakan salah satu unsur yang melekat pada diri manusia sebagai hak yang harus diterimanya. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 BAB III (Pasal 4, ayat 1) dikatakan “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Multikultural berarti keanekaragaman kebudayaan. Multikulturalisme secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan atau pluralism budaya.

Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Multikulturalisme adalah berbagai pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial, ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus.

Dilihat dari pengertian diatas, pendidikan multikultural adalah usaha sadar terhadap realitas keberagaman serta mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari serta memahami tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya.

Tujuan utama dengan adanya program “Kelas Multikultural” adalah untuk menanamkan serta memahami nilai-nilai multikulturalisme itu sendiri seperti nilai kerjasama, toleransi, kedilan/kesetaraan, cinta damai, dan nilai-nilai lainnya yang terkandung atau melalui 5 konsep utama program “kelas multikultural” di SMK Bakti Karya Parigi Kabupaten Pangandaran.